

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**  
**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV**

GEDUNG DJUANDA II JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021)3512240, 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6810 FAX (021) 3844783 SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor: PENG-21/SJ/UKPBJ/POKJA.IV/2021

Kelompok Kerja Pemilihan IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan akan melaksanakan tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Penambahan Lisensi Perangkat Lunak Big Data Cloudera TA 2021
- Lingkup pekerjaan : Melaksanakan penambahan lisensi, melakukan assessment, melakukan instalasi dan konfigurasi, monitoring, Analisa, rekonfigurasi, menyediakan dukungan service support berupa update/patching/bugfixing perangkat lunak Big Data Cloudera
- Nilai total HPS : Rp 14.793.412.092,80,- (empat belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua koma delapan puluh rupiah).
- Sumber pendanaan : DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.  
*(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)*
  - 1) Surat Izin : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - 3) Bidang pekerjaan:  
Kode KBLI : KBLI 4651
  - 4) Kualifikasi usaha: Kecil atau Non Kecil
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) 2019 atau 2020
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - 4) Kartu Tanda Penduduk .
- f. Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
  - 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - 6) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. Memiliki pengalaman Penyediaan barang pada Divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- i. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
- j. Memiliki pengalaman penyediaan barang atau renewal perangkat lunak Big Data Cludera paling kurang 1 (satu) siklus, baik yang sedang berjalan maupun telah dinyatakan selesai, dibuktikan dengan copy kontrak
- k. Untuk peserta kaulifikasi non kecil wajib Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (tahun 2020) yang telah diaudit oleh KAP
- l. Untuk peserta dengan kualifikasi dengan kualifikasi non kecil Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS Rp 7.396.706.046,40,- (tujuh miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat puluh enam koma empat puluh rupiah)

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : [www.lpse.kemenkeu.go.id](http://www.lpse.kemenkeu.go.id)

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan  
Dapat dilihat pada *website* LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 12 Maret 2021

Pokja Pemilihan IV